

SKRIPSI

**PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten
Aceh Barat Daya)**



Disusun Oleh :

**MAILIZAR
NIM. 150604119**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mailizar

NIM : 150604119

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Mailizar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

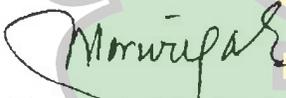
Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)

Disusun Oleh:

Mailizar
NIM. 150604119

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Marwiyati, S.E., MM.
NIP. 19740417200501200

Pembimbing II,



Cut Elfida, S.HI., MA.
NIDN. 2012128901

AR - RANIRY
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.SI.
NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)

Mailizar

NIM. 150604119

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juli 2022 M
24 Dzulhijjah 1442 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Marwiyati, S.E., MM.
NIP. 19740417200501200

Sekretaris,



Cut Elfida, S.HI., MA.
NIDN. 2012128901

Penguji I



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.SI.
NIP. 197204281999031005

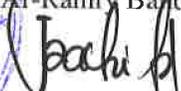
Penguji II,



Rachmi Meutia, M.Sc.
NIP. 198803192019032013



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. AgH
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mailizar
NIM : 150604119
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : mailizarizal@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 24 Juni 2022

Mengetahui:

Penulis

Mailizar

NIM. 150604119

Pembimbing I

Marwiyati, S.E., MM.

NIP. 19740417200501200

Pembimbing II

Cut Elfida, S.HI., MA

NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR

Segala puji kita haturkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku ketua prodi Ilmu Ekonomi dan seluruh staf ahli program studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Marwiyati, SE., M.M. selaku dosen pembimbing I sekaligus penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membina, memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Elfida, S.HI., MA. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing, membina, memberi petunjuk dalam menghadapi problematika yang penulis hadapi.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
7. Kepada keluarga tercinta yaitu Ayanda Syahrudin dan Ibunda Julita serta kedua adik saya yaitu Roza Winda dan Elfiraton Nisa dan abang Nurol Huda yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu, doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.
8. Sahabat-sahabat saya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis

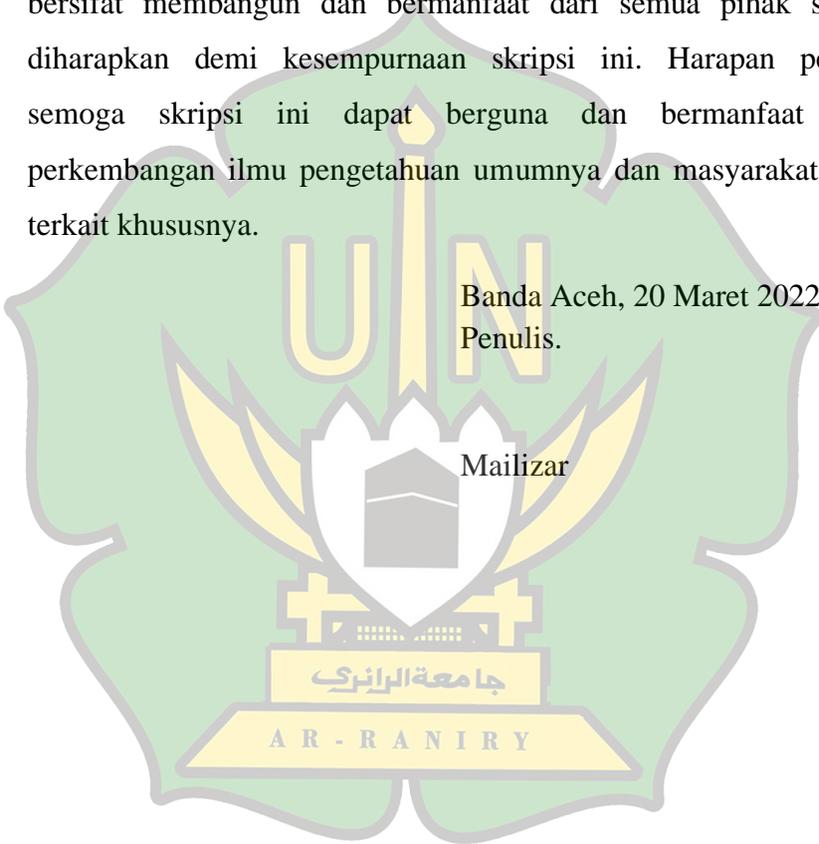
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2022

Penulis.

Mailizar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Mailizar
Nim : 150604119
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul : Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya).

Pembimbing I : Marwiyati, S.E., MM.

Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI, MA.

Jumlah UMKM di Abdya sudah mencapai angka ratusan, diharapkan dapat menjadikan perekonomian meningkat melalui pembukaan lapangan usaha bagi masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui peranan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UMKM dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1) UMKM di Desa Alue Sungai Pinang mempunyai dampak positif terhadap masyarakat diantaranya membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Faktor-faktor pendukung UMKM adalah dukungan pemerintah serta peminat dari tempe itu sendiri. 3) Faktor penghambat UMKM adalah modal, keterbatasan bahan baku, cuaca, jumlah karyawan serta jaringan usaha. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius lagi dalam upaya mendukung kemajuan UMKM, dapat memberikan pembinaan, pendampingan, serta peltihan untuk UMKM agar dapat bersaing dalam persaingan pasar. Diharapkan pelaku UMKM agar lebih inovatif serta dapat menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih guna mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: UMKM, Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10
2.1.1 Pengertian UMKM.....	10
2.1.2 Kriteria UMKM.....	13
2.1.3 Ciri-ciri UMKM.....	15
2.1.4 Klasifikasi UMKM	17
2.1.5 Karakteristik Usaha Mikro	18
2.1.6 Akses Pembiayaan UMKM	21
2.1.7 Lembaga Keuangan Mikro.....	23
2.1.8 Kekuatan dan Kelemahan UMKM	25
2.2 Konsep Kesejahteraan	28
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan	28
2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	34
2.2.3 Fungsi Kesejahteraan	35
2.2.4 Macam-macam Kesejahteraan	36
2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan ..	38
2.2.6 Indikator Kesejahteraan	40

2.3 Peran UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	42
2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	47
2.4.1 Faktor Pendukung	47
2.4.2 Faktor Penghambat	48
2.5 Pemberdayaan Masyarakat.....	50
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	50
2.5.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat	52
2.5.3 Tahap-tahap Pemberdayaan	52
2.5.4 Tujuan Pemberdayaan.....	53
2.5.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	53
2.6 Penelitian Terkait.....	55
2.7 Kerangka Pemikiran	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
3.1 Jenis Penelitian	61
3.2 Lokasi Penelitian	61
3.3 Sumber Data	62
3.4 Informan Penelitian	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Teknik Analisis Data	65
3.6.1 Reduksi Data	65
3.6.2 Penyajian Data	66
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
4.1.1 Sejarah Desa Alue Sungai Pinang.....	68
4.1.2 Sejarah Pemerintah Desa	68
4.1.3 Sejarah Pembangunan Desa Alue Sungai Pinang	70
4.1.4 Kondisi Demografis Desa Alue Sungai Pinang	70
4.1.5 Keadaan Sosial.....	71
4.1.6 Keadaan Ekonomi.....	73
4.2 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Alue Sungai Pinang Kecamatan Jumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.....	74

4.2.1 Struktur Organisasi UD. Mawar Sari	74
4.2.2 Struktur Organisasi Pabrik Tempe Soybean Zikra ..	81
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat UMKM dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya	89
4.3.1 UMKM UD. Mawar Sari	89
4.3.2 UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra.....	96
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah UMKM Aceh Barat Daya Tahun 2020	6
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	55
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Alue Sungai Pinang Berdasarkan Dusun	71
Tabel 4.2	Kegiatan Sosial Masyarakat	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UD. Mawar Sari.....	74
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pabrik Tempe Soybean Zikra	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	111
Lampiran 2 Foto Dokumentasi.....	112



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Peluang usaha ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi proses urbanisasi tingkat tinggi. Selain itu dengan menitikberatkan pada peluang usaha yang ada di sekitarnya diharapkan dapat menjadi simbol atau ciri khas daerah tersebut.

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan dan keberlangsungan hidup UMKM ikut dipengaruhi juga oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu motif ekonomi, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan dan habitat ekonomi yang menjadi tempat hidup seseorang atau suatu komunitas dalam melaksanakan kehidupan ekonominya.

UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga

merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Didasarkan atas kondisiter sebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri penggerak sektor riil ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui inpres No.6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia (Bahtiar, 2017)

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi, dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah asset maksimal 0 sampai Rp 50 juta dan omzet total sampai 300 juta.

Menurut Saputro (2019) UMKM merupakan stimulus perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan negara Amerika Serikat, tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh UMKM.

Bila kita melihat sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan yang memiliki pendapatan yang rendah (Sanusi, 2016), namun dibalik itu adanya UMKM yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai peran penting dalam memajukan masyarakat karena hal positif yang dapat kita lihat dalam hal ini adalah sangat besar menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tidak bisa dielakkan bahwasanya UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat melimpah mengikuti jumlah penduduk yang besar, sehingga Usaha Besar (UB) tidak sanggup menyerap semua pencari kerja dan ketidak sanggupannya usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif padat modal, sedangkan UMKM relatif padat karya. Selain itu, pada umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan

pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang cukup, sedangkan UMKM khususnya usaha kecil, sebagian pekerjanya berpendidikan rendah (Bachtiar, 2017)

Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, serta diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh, unggul dan mandiri, sehingga peranan dalam mendorong sektor perekonomian semakin meningkat

Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. Meningkatnya kemiskinan pada saat krisis ekonomi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan *output* bagian UMKM. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi di banyak Negara di dunia (Nopirin, 2019).

Peran UMKM yang paling nampak adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja yang bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat karena karakteristik pekerjaan disektor ini tidak memerlukan syarat yang banyak seperti pada perusahaan besar. Pada akhirnya produk-produk UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif akan mampu menembus pasar global.

Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. Meningkatnya kemiskinan pada saat krisis ekonomi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan output bagian UMKM. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia.

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beragam bidang industri. Secara geografis, Aceh Barat Daya merupakan wilayah pertanian dengan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan, tetapi terdapat juga beberapa UMKM atau di sebut juga *home industry*. Berikut penulis uraikan:

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM Aceh Barat Daya Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah UMKM
1	Babah Rot	102
2	Blang Pidie	6
3	Jeumpa	77
4	Lembah Sabil	46
5	Manggeng	295
6	Setia	55
7	Susoh	331
8	Tangan-tangan	0
Total		912

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Aceh

Tabel diatas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020, jumlah UMKM di Aceh Barat Daya adalah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Aceh adalah sebanyak 912 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di Aceh Barat Daya. Jumlah UMKM di Abdya yang sudah mencapai angka ratusan diharapkan dapat menjadikan

perekonomian wilayah meningkat melalui pembukaan lapangan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Dari sekian banyak UMKM di Abdya, kebanyakan dari pelaku UMKM bergerak dibidang perdagangan.

Penelitian tentang peranan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2015) dengan metode kualitatif yang berfokus pada pengembangan usaha, tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga seberapa besar peran usaha tersebut dalam meningkatkan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UMKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) menyimpulkan bahwa perlunya dukungan terhadap kegiatan UMKM, tidak hanya dari pemerintah akan tetapi juga dari partisipan maupun masyarakat itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Suci (2017) menyimpulkan bahwa peran UMKM itu sendiri masih harus melibatkan pemerintah pusat maupun daerah dalam proses pengawasan serta pengembangan kegiatan UMKM agar berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Usaha Micro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan (Studi Pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jumpa Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

1.4 Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan wahana aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan mata kuliah ekonomi pembangunan khususnya mengenai usaha kecil menengah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penulis dapat mengetahui perbandingan antara kenyataan dengan teori.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaku UMKM dalam mengelola usaha yang dilaksanakan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, bagi pihak pemerintah adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penyuluhan terhadap UMKM agar lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan usahanya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebuah egara dikatakan maju dapat dilihat dari beberapa sisi, salah satu sisinya adalah kesejahteraan masyarakatnya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019).

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019).

Di dalam Undang-undang tersebut, criteria yang digunakan untuk mendefinisikan (UMKM) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000,00.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000.

Chotim, dkk (2019) menyatakan lembaga keuangan mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai dengan konstituen nya, seperti terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan terutama simpan pinjam, diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana. Adanya lembaga keuangan mikro maka permasalahan modal usaha sudah menemukan solusinya sebagai pendobrak perkembangan mikro, dan salah satu lembaga keuangan mikro yang menangani pemberdayaan UMKM adalah koperasi. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan membuat lembaga

keuangan mikro yang khusus untuk masyarakat berekonomi kebawah atau memiliki pendapatan rendah (Taniman, 2017).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Di samping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu

dan memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB).

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

2.1.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: (Tambunan, 2019)
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3 Ciri-ciri UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Sarief ciri-ciri usaha mikro yaitu:

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karna biaya manajemennya relatif rendah.

7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

2.1.3.1 Ciri-ciri usaha kecil yaitu:

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa pendamping.

2.1.3.2 Ciri-ciri usaha menengah yaitu:

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih, modern dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur

sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.

3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
6. Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah memiliki akses non bank.
7. Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas

2.1.4 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Resalawati (2016) mengemukakan klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih

umum biasa disebut sector informal. Contohnya pedagang kaki lima.

- b) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.1.5 Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Anoraga (2015) menjelaskan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem cenderung lebih relatif administrasi pembukaan sederhana dan cenderung tidak memiliki kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar yang sangat terbatas
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas (Anoraga, 2015).

Menurut Tambunan (2019) karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

a. Daya tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

b. Padat karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

c. Keahlian khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. Jenis produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya

merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bamboo atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.

e. Keteraitan dengan sektor pertanian

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

f. Permodalan

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja.

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

2.1.6 Akses Pembiayaan UMKM

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga

keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah. Hal ini terjadi karena adanya pengendalian tingkat bunga dan pemberian pinjaman oleh perantara-perantara keuangan di kebanyakan negara yang sedang berkembang. Ketika lembaga keuangan formal atau komersial menyalurkan kredit ke pengusaha kecil maka intensif yang diterima tidak besar.

Hal ini dikarenakan biaya administrasi dan prosedural yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kredit yang diberikan (Arsyad, 2018). Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa usaha-usaha kecil dikelola oleh orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses untuk memperoleh pinjaman bagi pengusaha kecil berpendapatan rendah perlu ditingkatkan.

2.1.7 Lembaga Keuangan Mikro

Secara luas, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil, mikro bahkan usaha menengah. Pada umumnya LKM memberikan jasa keuangan dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya, LKM melakukan penghimpunan dana (*saving*) yang digunakan sebagai prasyarat kredit (Hadinoto dan Djoko, 2017). Selain menghimpun dana dan menyalurkan kredit, ada 3 tujuan umum yang ingin dicapai oleh LKM. Pertama, menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan/pengembangan usaha mikro. Kedua, meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok-kelompok yang rentan terutama perempuan dan orang-orang miskin. Ketiga, mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal melalui diversifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (Arsyad, 2018).

LKM memiliki 4 karakteristik yang menjadi kelebihan dibanding bank-bank modern. Pertama, LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya. Informasi tentang nasabah diperoleh dari hubungan dengan lingkungan sekitar atau komunitas yang ada. Hal tersebut dapat mengurangi biaya informasi yang dikeluarkan. Kedua, biaya administrasi yang harus dikeluarkan lebih rendah karena pekerjaan administrasi yang lebih sederhana. Ketiga, tingkat bunga LKM dapat disesuaikan dengan kehendak pasar. Keempat, LKM tidak

memiliki kewajiban pencadangan modal seperti yang diterapkan pada bank komersial modern (Arsyad, 2018).

Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Pertama, LKM formal yang terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah, terikat oleh peraturan dan pengawasan pemerintah atau bank sentral. Kedua, LKM semi formal yang terdiri dari lembaga yang tidak diatur otoritas perbankan tetapi terdaftar dan memperoleh ijin dari pemerintah. Ketiga, LKM informal yang terdiri dari perantara yang beroperasi di luar kerangka pengaturan dan pengawasan pemerintah (Arsyad, 2018).

BRI Unit merupakan salah satu contoh LKM formal berbentuk bank yang memfokuskan usahanya pada usaha mikro, kecil dan menengah. BRI Unit dibangun atas dasar pentingnya sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman ringan untuk menepis jeratan lintah darat. (Hadinoto & Djoko, 2017:3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga merupakan salah satu contoh LKM formal berbentuk bank dimana dalam pemberian kreditnya bank harus mengusahakan agar pinjaman tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu pinjaman yang diberikan harus bersifat produktif (Hadinoto dan Djoko, 2017).

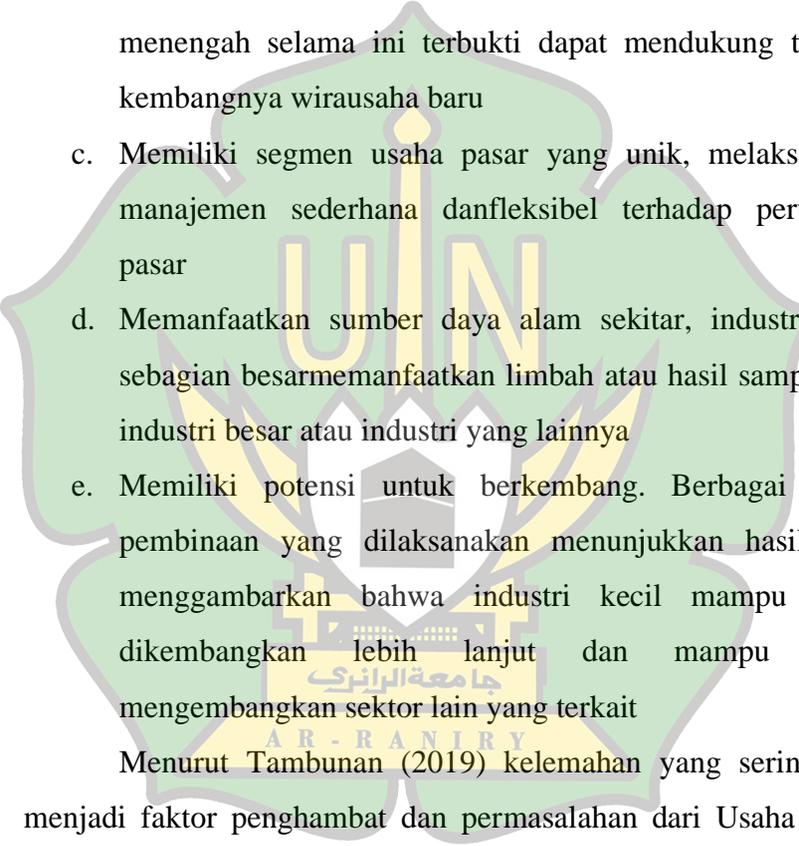
Salah satu bentuk LKM formal yang berbentuk non bank adalah perum pegadaian. Perum pegadaian telah menjadi alternatif pembiayaan bagi para pengusaha kecil. Hanya dengan membawa barang yang akan digadaikan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

nasabah bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang gadai. Proses pencairan pinjaman yang cepat dan prosedur yang tidak berbelit-belit membuat pegadaian semakin diminati banyak orang. Meskipun saat ini pegadaian tidak lagi identik dengan masyarakat kecil yang membutuhkan uang, namun pada dasarnya misi dari perum pegadaian adalah membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui pemberian kredit skala kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah atas dasar hukum gadai (Hadinoto dan Djoko, 2017).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk LKM semi formal. Dengan prinsip dasar menghimpun dan menyalurkan kredit ke masyarakat, sebenarnya KSP memiliki kekuatan untuk memfasilitasi para anggotanya yang membutuhkan bantuan modal usaha. Berkembangnya KSP akan membantu pengembangan kegiatan usaha skala kecil dan menengah. Eksistensi KSP sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu legal, kinerja usaha dan kepercayaan anggota. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga adanya ketidakberesan pada salah satu faktor tersebut akan membuat kinerja KSP menjadi kurang baik (Hadinoto dan Djoko, 2017).

2.1.8 Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah (Anoraga, 2015):

- 
- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
 - b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
 - c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
 - d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya
 - e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait
- Menurut Tambunan (2019) kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para

pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

2.2 Konsep Kesejahteraan

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan

Berdasarkan asal kata, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “*cetera*” yang artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “*cetera*” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2017).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia

terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam (Noveria, 2016).

Ismail, dkk (2015) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidupbangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.

Menurut Sunarti (2017), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari

besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2017).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2018).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usahapemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2019).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009, pasal 1 dan 2). Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

1. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

5. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Arthur Dunham dalam Sukoco (2017) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah (Bappenas, 2015).

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan *ukhrowi*. Todaro, dkk (2016) menjelaskan bahwa

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spriritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

b. Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa

Yaitu adanya pilhan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang teroganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha dapat membantu petani untuk bisa mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan meningkat dan

dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para petani (Faturocman, 2017).

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial (Notowidagdo, 2016).

Menurut Friendlander dalam Notowidagdo (2016), tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi

mungkin, kesehatan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.

Sedangkan menurut Fahrudin (2017), tujuan kesejahteraan sosial adalah:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meingkatkan dan mengembangkan taraf yang memuaskan.

2.2.3 Fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2017) bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta imenciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya

pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

3. Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.2.4 Macam-macam Kesejahteraan

sriyah (2017), kesejahteraan terdiri dari dua macam diantaranya:

1. Kesejahteraan Perorangan

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga bersangkutan,

sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomi, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari *utilities* yang positif dan negatif dalam *utilities* yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh sang warga dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam *utilities* negatif termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang itu (seperti terbuang waktu senggang) dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga lain (seperti dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan terbatas hanya pada kesejahteraan itu sendiri.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama, adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan

karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.

- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat diselesaikan dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan di dalamnya.
- d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan; sedangkan faktor eksternal yang

mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, maka pada penelitian ini dilakukan analisis faktor internal, eksternal dan manajemen keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan menurut indikator BKKBN adalah umur KK/istri, pendidikan KK, pendapatan; sedangkan faktor eksternal adalah tempat tinggal. Sementara itu, faktor manajemen yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan.

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dengan indikator BPS adalah pendidikan istri, pendapatan, pekerjaan suami bukan buruh, kepemilikan aset dan perencanaan. Kesejahteraan dengan menggunakan indikator pengeluaran pangan meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah umur KK/istri, sedangkan faktor eksternal adalah pinjaman uang/kredit barang. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan menurut indikator persepsi keluarga adalah pendapatan, pekerjaan suami dan kepemilikan aset; faktor eksternal meliputi tempat tinggal dan faktor manajemen yang berpengaruh adalah pembagian tugas (Iskandar, 2015).

2.2.6 Indikator Kesejahteraan

Sukirno (2017) menjelaskan bahwa kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi

dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan setiap penghuninya.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya

melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

2.3 Peran UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran seseorang dalam masyarakat erat kaitannya dengan kedudukan yang dimilikinya. Kedudukan diartikan sebagai

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Seseorang dikatakan menjalankan peranan apabila orang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki status posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ketentuan-ketentuan suatu peran adalah penggambaran normatif mengenai cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi untuk fungsi-fungsi mana terdapat posisi-posisi, cara-cara yang umumnya

disetujui bersama dalam kelompok mana saja yang mengakui suatu posisi tertentu. Posisi yang dimaksud dalam hal ini adalah posisi sosial individu dalam masyarakat. Posisi sosial adalah suatu penempatan individu dalam suatu kelompok atau masyarakat sehubungan dengan sumbangan-sumbangan yang ditentukan kepada suatu tata hubungan dengan orang lain (Zahroh, 2017).

Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran penting Usaha Mikro menurut Departemen Koperasi :

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
- b. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar.

- c. Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi.
- e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia, sejak diterpa badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang ditimbulkan, namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun negara (Medriyansyah, 2017).

Usaha kecil dan menengah mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam suatu negara. Oleh karena itu, negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Erwansyah (2018) menyebutkan tiga alasan utama suatu negara harus mengembangkan usaha kecil yaitu:

1. Pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
2. Seringkali mencapai produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman

3. Usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, usaha mikro memiliki peranan yang besar. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak UMKM juga intensif dalam menggunkan banyak sumber daya alam lokal. Oleh karena itu, UMKM dapat menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi.

Upaya untuk memajukan UMKM serta mengembangkannya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Kebutuhan UMKM terhadap banyak tenaga kerja dapat membantu banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang diakibatkan oleh sempitnya lowongan pekerjaan. Hadirnya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Faktor Pendukung

Mengingat UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi keluarga, maka upaya pemberdayaannya perlu diwujudkan. Keberhasilan UMKM menjadi fokus bersama untuk mengatasi kemiskinan. Ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan UMKM diantaranya yaitu:

1. Dukungan pemerintah
Pemerintah mendukung penuh upaya kemajuan UMKM. Pemerintah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan dibidang produksi, maka pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Selain hal tersebut, pemerintah dengan kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dukungan dan perhatian pemerintah terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan modal usaha serta pembiayaan-pembiayaan untuk menunjang usaha.
2. Kemajuan teknologi
Diera sekarang ini, peran teknologi sangat diperlukan. Melalui pengelolaan teknologi tepat guna, peran teknologi

sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi usaha masyarakat. Teknologi memberikan jalan keluar bagi para pelaku UMKM yang sering terhambat dalam memproduksi produk yang berkualitas. Penggunaan teknologi yang didukung dengan SDM yang berkompeten, diharapkan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dapat memiliki daya saing dengan produk-produk luar serta dapat menambah keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

2.4.2 Faktor Penghambat

Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, UMKM mempunyai beberapa kendala atau permasalahan yang dapat ditinjau dari eksternal dan internal.

1. Faktor Internal UMKM

a. Modal

Modal merupakan bagian penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Kurangnya modal lebih banyak dialami oleh UMKM karena merupakan usaha perorangan dan hanya mengandalkan modal pribadi yang terbatas. Manajemen UMKM menjadi penghambat UMKM memperoleh permodalan dari perbankan, umumnya manajemen keuangan yang dipakai UMKM masih tradisional sehingga pengelola

susah untuk membedakan antara uang operasional dan uang pribadi. Keterbatasan modal akan berpengaruh terhadap jumlah produksi sehingga secara langsung berdampak terhadap jumlah tenaga kerja.

b. Sumber daya manusia

Usaha mikro dan kecil menengah lebih banyak dijalankan secara tradisional dan terkadang merupakan usaha keluarga turun temurun. Kurangnya pemanfaatan dan pengetahuan teknologi yang dapat memberikan kemudahan serta mempercepat proses produksi dan meningkatkan kualitas produk membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing produk.

c. Jaringan usaha

Sebagian besar UMKM merupakan usaha turun temurun keluarga yang memiliki jaringan usaha yang terbatas serta kemampuan memahami kondisi pasar yang sangat rendah. Jaringan usaha akan berdampak terhadap jumlah produksi dan hal ini juga akan berdampak langsung terhadap jumlah kebutuhan tenaga kerja.

2. Faktor Eksternal UMKM

a. Terbatasnya sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya berakibat pada kemajuan usaha

tersebut. Kurangnya informasi terkait kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana tidak dapat berkembang dan tidak mampu mendukung kemajuan usaha. Hal ini akan berdampak pada usaha yang dijaankan.

b. Iklim usaha

Persaingan yang terjadi dalam mengembangkan bisnis dan memasarkan produk terkadang masih terdapat persaingan yang kurang sehat antar pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Hal ini akan mamucu persaingan yang tidak sehat dengan hadirnya monopoli barang tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha besar.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan berbagai pendekatan, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat bukan hal yang sama sekali baru, tetapi sebagai strategi dalam pembangunan relatif belum terlalu lama dibicarakan. Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Anwar, 2017).

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksial, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.

Dalam istilah lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Dengan paparan sederhana di atas, jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.

2.5.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja (Adi, 2017). Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap menurut (Machendrawaty dan Safei, 2016):

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak pemberdayaan.
3. Mengidentifikasi masalah.
4. Mengidentifikasi teknis data yang bermakna.
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan.

2.5.3 Tahap-tahap Pemberdayaan

Ada beberapa tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan. Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus). Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan

memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Keempat, mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya (Halim, 2015).

2.5.4 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada terbebasnya manusia dari hambatan kemiskinan dan kebodohan, tetapi lebih jauh lagi dari terbebasnya dekadensi moral, sehingga menjadi manusia yang progresif, mandiri, original dan mengagungkan kehambaan pada Allah SWT. Sehingga kemakmuran dan kemajuan yang dicapai oleh manusia yang lain, tetapi menjadi kebaikan bagi seluruh manusia.

2.5.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum, ada empat strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu (Suhartini, 2015):

1. *The Growth Strategy*

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk,

produktivitas, pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan. Pada awalnya strategi ini dianggap efektif, akan tetapi karena economic oriented sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin melebarnya pemisah kaya miskin, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, begitu terjadi krisis ekonomi maka konflik dan kerawanan sosial terjadi dimana-mana.

2. *The Welfare Strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap usaha pengembangan masyarakat, salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi.

3. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Akan tetapi, karena pemberdayaan masyarakat

sendiri belum dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Satu hal yang harus diperhatikan, kecepatan teknologi sering kali, bahkan selalu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri. Akibatnya, teknologi yang dipakai dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

4. *The Integrated or Holistic Strategy*

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena kegagalan ketiga strategi seperti telah dijelaskan, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut keberlangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

2.6 Penelitian Terkait

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Nurmah (2013) Peran Pengusaha Pembuatan Tempe dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi	Kualitatif	Usaha pembuatan tempe dalam memberdayakan masyarakat yaitu kebanyakan para pekerja atau pengrajin tempe direkrut atau diambil di

Tabel 2.1-Lanjutan

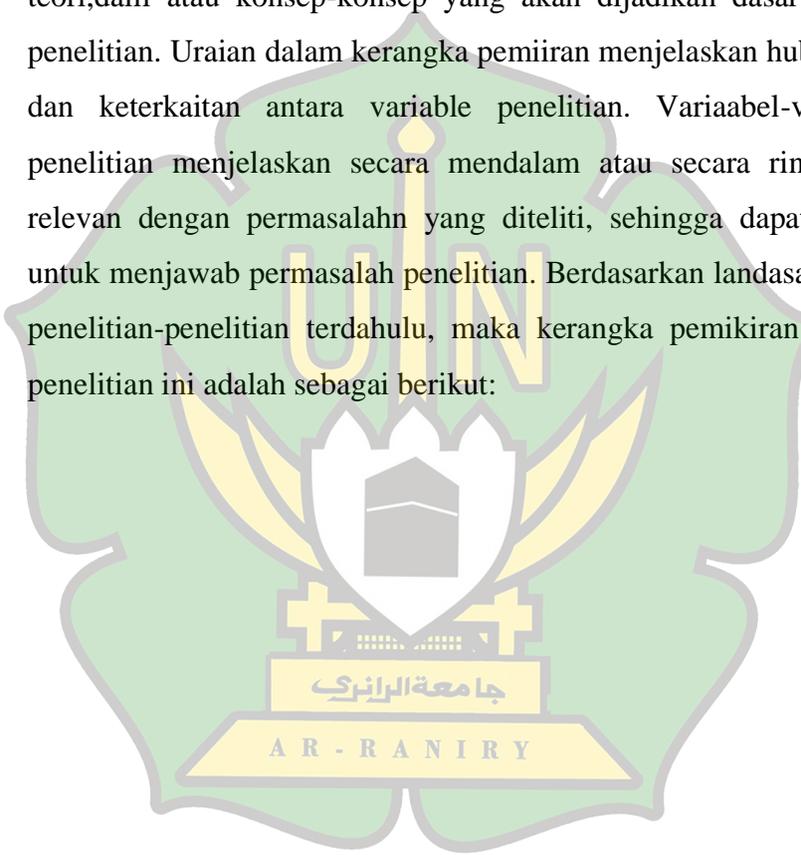
	<p>kasus di RT 16 RW 09 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan).</p>		<p>kampung halaman pengusaha pembuatan tempe yaitu dari pekalongan dan mereka sudah saling kenal sebelumnya. Para pengrajin tempe hanya lulusan SD dan SMP mereka tidak menamatkan pendidikan. alasan mereka pengrajin tempe karena untuk mencari di Jakarta sulit karena tidak memiliki ijazah.</p>
2	<p>Basar (2015) “Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan”</p>	<p>Kualitatif deskriptif mengalami</p>	<p>UKM yang berada di Kecamatan Cibeureum mengalami perkembangan yang positif baik dari jumlah UKM yang bertambah ataupun dari pendapatan masyarakat yang menjadi lebih baik, selain itu kegiatan UKM berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>
3	<p>Nasruddin (2016) “Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi di CV.Citra Sari Kota Makasar)”</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>UKM CV.Citra Sari berperan penting bagi peningkatan ekonomi karyawan karena mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, mampu membiayai</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

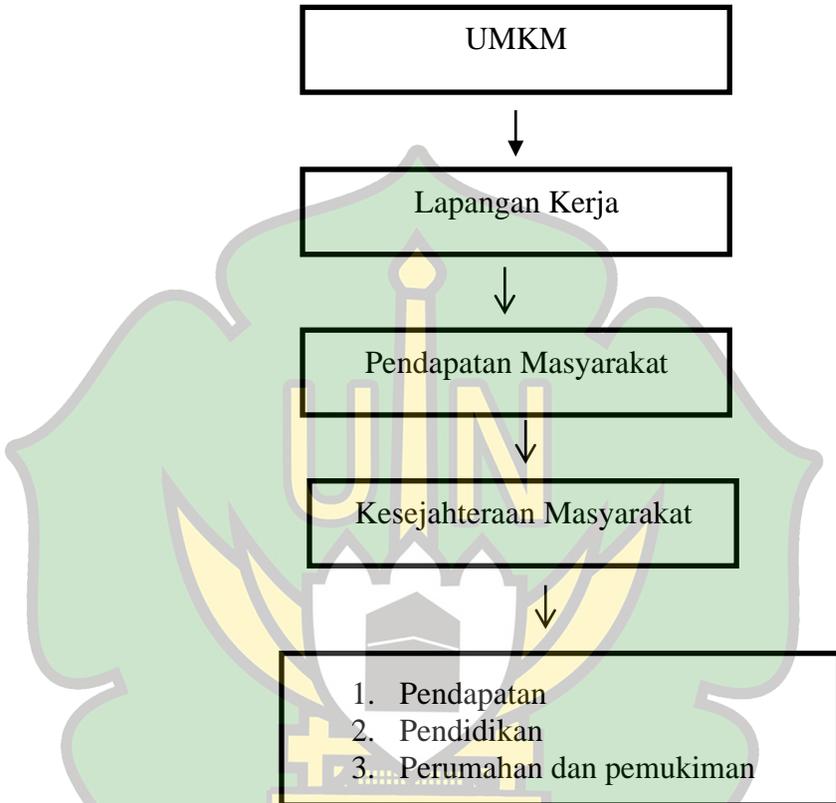
			sekolah adik-adiknya anakanaknya dan terbebas dari pengangguran.
4	Marlina (2017) “Analisis Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Kerajinan Kayu dalam Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Masyarakat”	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui industri kerajinan kayu memiliki peranan yang cukup berpengaruh diantaranya adalah, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
5	Medriyansah (2017) “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”	Deskriptif Analisis	Dengan ini usaha tempe tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan masyarakat sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6	Zahroh (2018) “Peran UMKM Konveksi Hijab dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan”	Kualitatif	Keberadaan UMKM konveksi hijab di tengah tengah masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian menjelaskan secara mendalam atau secara rinci dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan landasan teori penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa dikatakan belum maksimal karena masih banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang mencari kerja dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat tinggi yang menyebabkan kesenjangan sosial.

Pengembangan UMKM merupakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi msyarakat serta membantu

masyarakat untuk meningkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan UMKM dalam suatu daerah dapat memberikan beberapa manfaat seperti pengembangan potensi masyarakat di desa tersebut.

Secara tidak langsung, keberadaan UMKM juga bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga dengan keberadaan UMKM bisa memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga keberadaan UMKM diharapkan bisa membantu ekonomi masyarakat menjadi sejahtera.

Kesejahteraan merupakan suatu tahap dimana kebutuhan hidup seseorang terpenuhi, sehingga orang tersebut merasa cukup dan tidak mempunyai kekhawatiran minimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti makan, minum, kesehatan, dan pendidikan. Dalam hal ini UMKM diharapkan bisa mendongkrak dan menjadi motor kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai peranan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat Daya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

Menurut Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah (Moleong, 2015). Analisis deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau dasar kondisi yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mensejahterakan masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian pada dua tempat UMKM yaitu di usaha tempe UD. Mawar Sari dan Pabrik Tempe Soybean

Zikra. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di di usaha tempe UD. Mawar Sari dan Pabrik Tempe Soybean Zikra Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa sebagai lokasi penelitian yaitu karena di di usaha tempe UD. Mawar Sari dan Pabrik Tempe Soybean Zikra Desa Alue Sungai Pinang belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, usaha tempe di desa Alue Sungai Pinang merupakan salah satu usaha tempe yang maju di Aceh Barat Daya.

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Basar, 2015). Data primer adalah diperoleh langsung dari informan penelitian, catatan hasil observasi dan wawancara selama di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku dan majalah sebagai teori, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai

teori, majalah dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi (Sujarweni, 2015). Adapun data sekunder diperoleh dari UMKM Aceh.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (Sukandarumudi, 2017). Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dan masyarakat. Pemilihan informan menggunakan metode *snowball sampling*, yaitu peneliti pertama-tama datang pada seseorang yang dianggap *key informan*, kemudian informan tersebut menunjukkan informan lain sebagai informasi baru untuk dijadikan informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan didalam pengumpulan data selama proses penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono, 2015):

1. Pengamatan (observasi)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2015). Observasi merupakan salah satu metode untuk menyimpulkan data, dalam hal ini

penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk menarik kesimpulan. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM di Aceh Barat Daya. Beberapa hal yang terkait dengan UMKM peneliti amati langsung.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Sugiyono, 2015). Penelitian ini mewawancarai pemilik UMKM dan masyarakat yang bekerja ditempat tersebut. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan pedoman wawancara dimana metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksud sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari risalah resmi yang terdapat baik dipenelitian

maupun di instansi lain berpengaruh dengan lokasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto saat peneliti melakukan penelitian dan profil tempat penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digambarkan deskripsi tentang kesejahteraan masyarakat melalui narasi yang menunjukkan permasalahan yang dibahas. Hasil wawancara juga disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian (Moleong, 2015). Untuk selanjutnya dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan.

Dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas bagaimana perananan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.6.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015) reduksi adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data dimulai setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian. Proses ini dimulai dengan membuat

transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

3.6.2 Penyajian Data

Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

Menurut Moleong (2015) proses ini merupakan suatu proses untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipnotis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain (Sugiyono, 2015).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Alue Sungai Pinang

Alue Sungai Pinang terletak dipesisir Barat Daya Provinsi Aceh dan merupakan salah satu gampong dari 5 gampong dalam kemukiman Kuta Jeumpa dan salah satu gampong dari 10 di kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Desa ini berada rata-rata 10 meter di atas permukaan laut. Menurut penuturan para sesepoh gampong. Nama desa Alue Sungai Pinang diambil dari kisah legenda Teuku Malem Diwa. Karena desa Ini tumbuh pohon pinang besar (Area Ceuracheu).

Selain itu desa Alue Sungai Pinang juga dinamai atas dasar di desa ini banyak terdapat Alue (anak sungai) yang mengalir air kesawah-sawah penduduk, juga sungai yang sebagian besar digunakan masyarakat desa sebagai tempat MCK (mandi, cuci, dan kakus). Oleh sebab itu maka orang tua gampong pada zaman dulu lebih kurang sekitar tahun 1920 membuatnya menjadi nama sebuah gampong yaitu Alue Sungai Pinang (RPJM Desa Alue Sungai Pinang, 2021).

4.1.2 Sejarah Pemerintah Desa

Sistem pemerintahan gampong Alue Sungai Pinang sudah dibangun sejak zaman dahulu, dimana fungsi pemerintahan masih sangat kental dengan budaya lokal, yaitu pemerintahan yang

mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai prinsip pembangunan. Keberadaan meunasah merupakan salah satu simbol sekaligus kekuatan untuk membicarakan setiap persoalan masyarakat, mulai dari masalah pertanian, ekonomi, pendidikan sampai masalah pelayanan kepada masyarakat. Dari sini pemerintah membicarakan strategi pembangunan. Meunasah ini pula sebagai tempat awal perkembangan sistem pemerintahan Alue Sungai Pinang. Pada awal pembentukan pemerintahan secara formal, Alue Sungai Pinang dipimpin oleh seorang Keuchik yang dibantu oleh perangkat gampong pada masa lalu yaitu terdiri dari Keuchik dan para utusan *Tuha Peut* sebagai badan permusyawaratan gampong sudah mulai berfungsi pada zaman dahulu dan penyelenggaraan pemerintah oleh *Tuha Peut* masih sangat kental dengan adat istiadat.

Tuha Peut berwenang memberi pertimbangan terhadap keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh keuchik. Imum meunasah sebagai pimpinan meunasah juga sangat berperan dalam pemerintah gampong, meunasah yang disampaikan di atas bukan hanya mengatur strategi tapi juga bagian dari sistem pemerintahan, imum meunasah mengorganisir kegiatan – kegiatan keagamaan yang ada di gampong.

4.1.3 Sejarah Pembangunan Desa Alue Sungai Pinang

Pembangunan Alue sungai pinang sejak dari tahun ketahun mengalami pasang surut, mulai dari sistem yang dijalankan sampai pada geliat pembangunan yang terjadi. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pemimpin gampong dan kondisi masyarakat yang mendiami gampong Alue Sungai Pinang dari masa kemasa. Secara umum pembangunan Alue Sungai Pinang dilakukan dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari setiap pembangunan, baik pembangunan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat secara sosial, kultur pembangunan yang dilakukan merupakan sebuah proses yang dibangun dari dalam, artinya pembangunan yang melibatkan masyarakat baik secara gotong royong maupun swadaya. Masyarakat masih memandang pembangunan gampong sebagai milik bersama yang akan dinikmati secara bersama, kebersamaan, gotongroyong, keswadayaan merupakan nilai nilai yang dikedepankan. Pembangunan tidak harus bergantung dari pihak lain. Pembangunan bisa dilakukan sendiri. Nilai-nilai inilah yang menjadi modal awal pembangunan tetapi banyak yang tidak difungsikan secara maksimal.

4.1.4 Kondisi Demografis Desa Alue Sungai Pinang

Penduduk Alue Sungai Pinang pada awal tahun 2021 terdaftar berjumlah 2876 (676 KK). Kepadatan penduduk terhadap

luas wilayah termasuk sangat rendah, artinya tekanan penduduk terhadap lahan masih kecil.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Alue Sungai Pinang Berdasarkan Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah KK	L	P	Jumlah Jiwa
1	Pasar	137	249	270	519
2	Alue Sanggeu	67	233	331	554
3	Alue Seulaseh	243	430	505	935
4	Alue Tungku Muda	123	281	256	537
5	Gunong Tengku	106	204	226	430
Jumlah		676	1338	1448	2876

Sumber: Data Desa Alue Sungai Pinang, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Alue Sungai Pinang berdasarkan Dusun adalah berjumlah 2876 yang meliputi dusun Pasar berjumlah 519 Jiwa, dusun Alue Sanggeu berjumlah 554 Jiwa, dusun Alue Seulaseh 935 Jiwa, dusun Tungku Muda berjumlah 537 Jiwa dan dusun Gunong Teungku berjumlah 430 Jiwa.

4.1.5 Keadaan Sosial

Kondisi sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di desa Alue Sungai Pinang berjalan dengan baik. Sikap solidaritas sesama, gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dalam agama islam memang sangat ditekankan untuk saling

berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan Ukhuwah Islamiyah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik, apalagi banyak pesantren yang menjadi tempat belajar ilmu agama semakin menambah kekuatan dan hubungan antar masyarakat. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan gampong Alue Sungai Pinang dalam pengelolaan pemerintahan gampong yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan gampong itu sendiri.

Tabel 4.2
Kegiatan Sosial Masyarakat

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
PEMUDA	Olahraga Berkunjung ketempat orang sait Shalat berjama'ah Budaya gotong royong yang sangat tinggi Majelis ta'lim Wirid yasin Melakukan takziah ketempat orang meninggal dunia
IBU-IBU	Pengajian rutin (wirid yasin) Takziah ketempat orang meninggal dunia Berkunjung ketempat orang sakit atau melahirkan Shalat berjamaah 10 program pokok PKK Simpan pinjam anggota PKK
BAPAK_BAPAK (Orang Tua)	Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia Takziah ketempat orang meninggal Berkunjung ketempat orang sakit Masih tinggi budaya gotong royong

Sumber: RPJM Desa Alue Sungai Pinang, 2021

4.1.6 Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian gampong tidak lepas dari peran masyarakat dalam berusaha mengembangkan perekonomian keluarga masing-masing. Secara umum masyarakat gampong Alue Sungai Pinang bekerja sebagai petani, berkebun, pedagang, pertukangan dan sebagian lainnya ada yang menjadi pegawai negeri sipil. Dengan beraneka ragam jenis pekerjaan masyarakat maka kondisi perekonomian keluarga juga berbeda beda. Namun demikian tidak ada masyarakat yang iri dan mencurigai sesama. Saat ini, pertanian dan perkebunan sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diseluruh gampong yang ada. Alue Sungai Pinang sendiri memiliki areal pertanian yang cukup luas sehingga program pemerintah di sektor pertanian dapat menyerap atau merasakan program pemerintah disektor pertanian. Sama halnya dengan perkebunan, masyarakat juga sama sama berusaha dan bekerja termasuk dibidang lainnya juga. Jika dilihat dari kebutuhan rumah tangga pendapatan rata-rata penduduk Alue Sungai Pinang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun terbatas. Masyarakat dapat makan tiga kali sehari seperti digampong-gampong lain. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah gampong dan pemerintah daerah. Demikian juga halnya dengan peluang kerja, ada masyarakat yang bekerja musiman dan ada juga yang bekerja tetap. Tantangan besar bagi pemerintah gampong adalah bagaimana

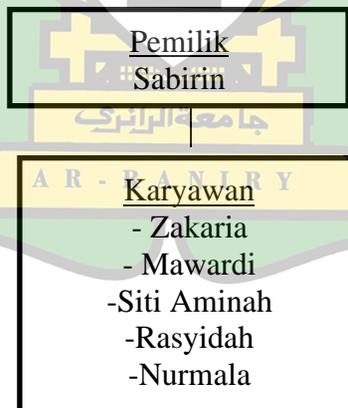
pekerja musiman ini juga dapat bekerja secara tetap dengan penghasilan yang memadai.

4.2 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Alue Sungai Pinang Kecamatan Jumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

4.2.1 Struktur Organisasi UD. Mawar Sari

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Adapun struktur organisasi UMKM UD. Mawar Sari dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UD. Mawar Sari



Berdasarkan struktur UMKM di atas, UD. Mawar Sari merupakan kepemilikan oleh Bapak Sabirin. UD. Mawar Sari

terletak di desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. UD. Mawar Sari berdiri pada tahun 2015, dengan jumlah karyawan pertama hanya 2 orang dan kini sudah mencapai 6 orang karyawan.

Adanya usaha tempe yang ada di desa Alue Sungai Pinang memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, UMKM di desa Alue Sungai Pinang memiliki peranan sebagai berikut:

1. Membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan
Hadirnya UMKM tersebut manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemilik UMKM akan tetapi para pekerja di tempe usaha tersebut juga merasakan manfaat yang sangat besar. Sebelumnya, para karyawan yang bekerja di tempat usaha tempe UD. Mawar Sari rata-rata memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Sebelum bekerja di UD. Mawar Sari, mereka hanya memiliki satu sumber pendapatan yaitu dari hasil panen padi dan berkebun yang tidak menentu dan tidak jelas berapa banyak yang didapat, ditambah dengan seringnya gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca yang menyebabkan petani merugi, sehingga pendapatan yang mereka hasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak bisa menyisihkan uang untuk simpanan. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan di UD. Mawar Sari yaitu sebagai berikut:

“Dulu sebelum kerja disini saya hanya bertani, tidak ada pekerjaan lain. Hasilnya juga pas-pasan. Selama kerja disini alhamdulillah ada sedikit simpanan untuk kebutuhan yang mendesak kedepannya seperti untuk berobat dan kebutuhan anak sekolah” (Zakaria, 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa UMKM UD. Mawar Sari dapat mensejahterakan karyawannya melalui memberikan lapangan kerja kepada karyawan tersebut. Dengan bekerja, salah satu karyawan UD. Mawar Sari dapat memenuhi kebutuhan secara primer maupun secara sekunder.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada satu kurun tertentu. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek tertentu. Dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat dilihat dari beberapa hal dibawah ini:

a. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan yang lebih tinggi dapat mengantarkan masyarakat pada pekerjaan yang lebih mudah. Dalam

persaingan kerja, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah bersaing mendapatkan pekerjaan dibanding dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dapat diketahui bahwa dengan bekerja di tempat usaha tempe Mawar Sari dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya serta dapat menyekolahkan anak kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan wawancara salah satu karyawan di UD. Mawar Sari yaitu sebagai berikut:

“Alhamdulillah dengan bekerja disini sangat membantu saya mencukupi kebutuhan pendidikan anak saya, saya bisa beli buku dan perlengkapan lainnya untuk sekolah anak” (Mawarda, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dengan bekerja di UMKM UD. Mawar Sari, salah satu karyawan dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan keluarganya. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari

kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia yang produktif.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Pendapatan menjadi penentu kesejahteraan masyarakat. Pendapatan masyarakat adalah penerimaan gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang dikerjakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karyawan yang bekerja di bagian produksi pada UD. Mawar Sari rata-rata digaji Rp35.000-Rp40.000 per hari. Jika dikalikan dalam satu bulan mereka mendapatkan gaji sebesar Rp1.100.000-Rp1.200.000 perbulannya. Dalam sistem gaji, pemilik usaha tidak menerapkan gaji bulanan karena kegiatan produksi tidak setiap hari dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan bahan baku, sehingga para karyawan lebih memilih sistem gaji harian yang disesuaikan dengan kegiatan produksi. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan di UD. Mawar Sari yaitu sebagai berikut:

“Sehari kita bisa dapat Rp35.000. Kalau produksinya lebih banyak, kita bisa dapat sampai Rp40.000 setiap harinya” (Siti Aminah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata penghasilan karyawan yang bekerja di UD. Mawar Sari Rp 35.000- Rp 40.000 perhari. Menurutnya, penghasilan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup manusia, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang dikatakan sejahtera adalah seseorang yang telah mampu memenuhi keseluruhan hidupnya.

c. Perumahan dan pemukiman

Perumahan merupakan kebutuhan yang sangat mendasarkan bagi setiap orang. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal untuk berteduh atau berlindung dari panas dan hujan. Secara umum, kualitas tempat tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga yang dapat dilihat

dari fisik rumah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan adalah sebagai berikut:

“Dulu itu rumah saya bisa dibilang tidak layak huni, karena tidak punya uang untuk renovasi rumah, penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah sejak bekerja di sini saya sudah bisa merenovasi rumah sedikit demi sedikit” (Nurmala, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran UMKM UD. Mawar Sari telah memberikan sejumlah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang bekerja di UMKM tersebut. Dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari, dapat mengenyam biaya pendidikan, pendapatan yang real mampu membuat karyawan yang bekerja mendapatkan rumah layak huni.

Dari cerita salah satu karyawan, sebelum bekerja di UMKM Mawar Sari beliau adalah seorang petani dan tidak mempunyai pekerjaan lain hanya mengandalkan dari hasil pertanian. Sebelum bergabung bekerja di tempat olahan tempe tersebut, beliau masih tinggal tinggal di rumah sewaan milik saudaranya. Setelah bekerja dan menekuni kegiatan usaha di UD. Mawar

Sari dia perlahan-lahan dapat mengumpulkan uang dan membangun rumah sendiri. Meskipun untuk membangun rumah tidak didapat dari hasil bekerja di UMKM semata, namun hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan yang berdampak positif pada kebutuhan perumahan. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan adalah sebagai berikut:

“Dulu saya itu tinggal di rumah sewa milik saudara. Alhamdulillah sekarang ada rumah sendiri walaupun cukup sederhana” (Zakaria, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat atau karyawan yang bekerja di UD. Mawar Sari meningkat secara signifikan. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa setelah bekerja di UD. Mawar Sari karyawan UMKM UD. Mawar Sari dapat memiliki rumah sendiri.

4.2.2 Struktur Organisasi Pabrik Tempe Soybean Zikra

Pabrik tempe Soybean Zikra berdiri pada tahun 2013 silam, didirikan oleh bapak Alban Safari. Pada tahun 2022, pabrik tempe Soybean Zikra telah memiliki total karyawan 8 orang. Karyawan

tersebut terbentuk dari tim laki-laki yang berjumlah 4 orang dan 4 orang perempuan. Adapun struktur tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 4.2.

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Pabrik Tempe Soybean Zikra



Berdasarkan struktur di atas, dapat dilihat bahwa pabrik tempe soybean zikra didirikan oleh Alban Safari dengan jumlah karyawan total 8 orang. Adanya usaha tempe yang ada di desa Alue Sungai Pinang memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, UMKM di desa Alue Sungai Pinang memiliki peranan sebagai berikut:

1. Membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan

Masyarakat desa Alue Sungai Pinang pada umumnya bermata pencarian sebagai petani yang hanya mengharapkan pendapatan dari hasil taninya yang terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini dengan adanya. UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra dapat membantu mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana jika hanya mengharapkan penghasilan dari hasil taninya tidak dapat ditaksir atau diperkirakan hasilnya namun dengan bekerja di UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra mereka mendapatkan penghasilan yang jelas sembari mengisi waktu luang diantara menunggu hasil tani mereka dan membantu pendapatan rumah tangga. Terlebih lagi, dominan karena faktor usia dan pendidikan yang masih tergolong rendah tidak memungkinkan mereka untuk diterima atau bekerja di tempat lain yang memerlukan skill atau kemampuan khusus. Usaha pembuatan tempe merupakan usaha rakyat yang sangat menjanjikan karena setiap orang pasti menjadikan tempe sebagai lauk atau makanan sehari-hari, sehingga permintaan akan tempe tidak akan pernah sepi. Seperti dijelaskan oleh salah satu karyawan yang bekerja di Pabrik Tempe Soybean Zikra.

“Prospek perkembangan usaha pembuatan tempe bagus, tidak bisa putus karena tempe merupakan makanan sehari-hari. Tempe makanan pokok, kalau jualan makanan pokok setiap hari bisa jual. Jadi setiap hari dapat uang” (Zainuddin, 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa karyawan UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra sangat senang bisa bekerja di Pabrik Tempe Soybean Zikra tersebut. Hal itu dikarenakan karyawan yang bekerja selalu mendapatkan upahnya setiap hari. UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra telah lama berjalan. Seperti dijelaskan salah satu informan:

“Bahkan saya tidak ingin mencari pekerjaan yang lainnya, saya sudah sangat menikmati bekerja di pabrik ini. Karena selain saya untuk mencari nafkah, saya juga memperoleh teman atau saudara” (Sofian Jalil, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa peluang kerja yang diberikan oleh Pabrik Tempe Soybean Zikra sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat atau karyawan yang bekerja di Pabrik Tempe Soybean Zikra tersebut. Mengingat pada ini ekonomi masyarakat semakin menurun, akibat dari pada perekonomian tersebut

banyak masyarakat yang ingin bekerja dan menghasilkan rupiah demi kesejahteraan keluarganya. Oleh karena itu, Pabrik Tempe Soybean Zikra merupakan sebuah alternatif yang dapat membuka peluang kerja dan lapangan kerja yang baik bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya UMKM ini dapat membantu atau peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana dalam Ilmu ekonomi pendapatan didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Sedangkan tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap rumah tangga dalam bentuk uang atau natura yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang baik berupa uang kontan ataupun natura.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang

berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Sedangkan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan indikator yaitu:

a. Pendidikan

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin maju bangsa tersebut. Pendidikan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan di UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra:

“Dari penghasilan bekerja disini dapat membantu biaya pendidikan anak saya atau sekolah anak saya yang lulus terus pondok pesantren dan sekolah adik-adiknya”. (Idah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan

kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dari proses pendidikan.

b. Pendapatan

Peran penting UMKM secara umum dapat kita lihat dari perkembangan yang signifikan dan peran UMKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran UMKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga pemberdayaan UMKM merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan karyawan dalam meningkatkan perekonomian dan menjadikan indikator pentingnya UMKM dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pabrik Tempe Soybean Zikra mengatakan:

“Alhamdulillah, pendapatan selama bekerja disini cukup untuk membantu perekonomian keluarga saya”
(Novita, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan karyawan selama bekerja di Pabrik Tempe Soybean Zikra dapat membantu memenuhi kebutuhan perekonomian karyawan tersebut. Kondisi ekonomi keluarga adalah keadaan dimana keluarga itu dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu (memperoleh pendapatan) sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Perumahan dan pemukiman

Manusia membutuhkan rumah di samping sebagai tempat tinggal untuk berteduh atau berlindung dari hujan dan panas juga tempat berkumpul para penghuni merupakan suatu ikatan keluarga. Secara umum, kualitas tempat tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pabrik Tempe Soybean Zikra mengatakan:

“Pertama saya tinggal di salah satu rumah warga di Desa ini, namun setelah dua tahun kemudian saya memiliki rumah dan tanah sendiri. Semenjak bekerja di Pabrik Tempe Soybean Zikra saya bisa memiliki

tabungan dan membeli rumah dan tanah”.(Ansari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra telah memberikan sejumlah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang bekerja di UMKM tersebut. Dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat mengenyam biaya pendidikan, pendapatan yang real mampu membuat karyawan yang bekerja mendapatkan rumah layak huni.

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat UMKM dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya

4.3.1 UMKM UD. Mawar Sari

Sukses atau tidaknya sebuah kegiatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu kesuksesan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat.

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Pemerintah

Pemerintah mendukung penuh upaya kemajuan UMKM. Pemerintah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan

pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan dibidang produksi, maka pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Selain hal tersebut, pemerintah dengan kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dukungan dan perhatian pemerintah terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan modal usaha serta pembiayaan-pembiayaan untuk menunjang usaha. Dalam wawancara bersama pemilik UMKM menyebutkan bahwa:

“Alhamdulillah pemerintah sangat perhatian, kita beberapa kali diundang untuk ikut pelatihan serta ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah”
(Sabirin, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah sangat memperhatikan UMKM yang berada di daerah setempat. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa pemerintah sering melakukan pelatihan terhadap pelaku UMKM di daerah tersebut.

b. Peminat

Minat beli konsumen adalah perilaku konsumen dimana seseorang mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, menggunakan dan mengonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Minat beli konsumen menjadi penentu jalannya serta berkembangnya suatu usaha. Jika konsumen memiliki minat yang tinggi untuk membeli suatu produk, maka dapat dipastikan bahwa produk tersebut akan terus berkembang, namun jika minat beli konsumen rendah, maka jalannya usaha akan sulit berkembang. Dalam usaha tempe UD. Mawar Sari, minat beli konsumen terbilang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yaitu sebagai berikut:

“Untuk minat masyarakat terhadap tempe terbilang sangat tinggi, karena ketika sepi saja bisa menghabiskan 5 karung kacang kedelai” (Rasyidah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan akan pangan berjenis tempe sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu dibuktikan dari

minat masyarakat untuk kebutuhan tersebut tinggi. Dengan minat masyarakat yang membutuhkan pangan tersebut, maka UMKM tersebut terus kokoh untuk memproduksi tempe setiap harinya.

2. Faktor Penghambat

Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terhadap beberapa hal yang menjadi penghambat pergerakan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat diantaranya yaitu:

a. Modal

Modal merupakan hal terpenting untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kendala yang sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah adalah kekurangan modal karena UMKM hanya mengandalkan modal dari pemilik usaha yang terbatas karena merupakan usaha perorangan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha menerangkan bahwa:

“Dulu saya memulai usaha dengan modal yang sedikit, saya ada rencana untuk membuka cabang baru tapi masih terkendala di modal” (Sabirin, 2021).

Kecukupan modal untuk memulai usaha sangat penting agar tercapai seperti yang diharapkan. Beberapa orang yang ingin memulai usaha mengambil inisiatif untuk mencari modal tambahan untuk memulai usaha baik dari pinjaman perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kesulitan administrasi dan persyaratan lainnya menjadi alasan para pelaku usaha tidak memperoleh pinjaman dari perbankan. Sebagaimana wawancara dengan pemilik usaha yaitu sebagai berikut:

“Pernah ingin mengambil pinjaman dari bank, akan tetapi persyaratannya sangat sulit, oleh karena itu saya tidak mengambilnya” (Sabirin, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi oleh UMKM UD. Mawar Sari adalah berupa kekurangan modal. Dengan minat masyarakat yang tinggi akan kebutuhan tempe, maka terpaksa UMKM UD. Mawar Sari memproduksi tempe dalam jumlah yang besar. Namun, untuk memproduksi dalam jumlah yang besar tersebut memerlukan modal yang besar juga. Modal merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam berbisnis atau berusaha. Oleh karena itu tanpa adanya modal, seorang pelaku usaha tidak bisa bergerak sebagaimana seharusnya.

b. Ketersediaan bahan baku

Selain kecukupan modal, bahan baku juga menjadi syarat utama kelancaran suatu produksi. Apabila terjadi kekurangan bahan baku akan mempengaruhi jalannya produksi sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sesuai seperti yang diharapkan yang dapat mempengaruhi penjualan. Apabila proses produksi terhambat, ketersediaan produk akan bermasalah dan tidak mampu memenuhi pesan konsumen. Dalam produksi tempe, ketersediaan kacang dapat menghambat proses produksi seperti hasil wawancara dengan pemilik usaha yaitu sebagai berikut:

“Kendala yang sering kita alami itu jika tidak ada kacang. Rata-rata kita menghabiskan 4-5 karung tempe setiap hari, jika tidak ada kacang berarti kita tidak bekerja” (Sabirin, 2021).

Ketersediaan bahan baku juga berdampak pada karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Ketika bahan baku untuk produksi tidak tersedia, maka para pekerja tidak bisa bekerja dan tidak memperoleh upah dikarenakan sistem gaji yang diterima oleh para

karyawan adalah sistem gaji harian. Wawancara dengan Ibu Nurmala salah satu karyawan di tempat usaha tempe tersebut, ia menyebutkan:

“Kalau kacang tidak ada, kita tidak kerja. jadi hari itu kita tidak ada pemasukan” (Nurmala, 2021).

Dalam usaha UMKM seperti UD. Mawar Sari, kebutuhan pokok dalam produksi tempe adalah kacang kedelai. Di daerah setempat, kacang kedelai masih dikategorikan langka atau kurang. Sering terjadi kendala kekurangan bahan baku untuk mereproduksi tempe tersebut. Sehingga karyawan yang bekerja di UD. Mawar Sari tidak bekerja jika tidak ada pemasukkan bahan baku kacang kedelai tersebut.

c. Jaringan usaha

Sebahagian usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha turunan keluarga dan memiliki jaringan usaha yang terbatas serta kemampuan memahami pasar yang sangat rendah. Kualitas barang serta persaingan dengan pelaku usaha yang lain menjadi suatu kendala dan hambatan dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini, UD. Mawar Sari hanya menjangkau wilayah Aceh Barat Daya untuk

memasarkan produk sebagaimana wawancara dengan salah satu karyawan yaitu sebagai berikut:

“Kita memasarkan produk masih disekitaran ini. Kalau kesana sampai ke Lama Inong, kalau kesana di pasar Blangpidie”. (Zakaria, 2021).

Selain itu, kesulitan beradaptasi dengan teknologi juga menjadi kendala pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Para pelaku usaha masih mempertahankan dan menggunakan cara tradisional dalam proses produksi sehingga kesulitan dalam bersaing dengan para pelaku usaha yang sudah beralih ke teknologi yang canggih.

4.3.2 UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra

Sukses atau tidaknya sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu kesuksesan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat.

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Pemerintah

Pemerintah mendukung penuh upaya kemajuan UMKM. Pemerintah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan

pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan dibidang produksi, maka pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Selain hal tersebut, pemerintah dengan kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dukungan dan perhatian pemerintah terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan modal usaha serta pembiayaan-pembiayaan untuk menunjang usaha. Begitupun yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra, dimana pemerintah sangat berperan terhadap UMKM tersebut. Seperti hasil wawancara dengan pemilik UMKM menyebutkan bahwa:

“Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM ini cukup baik” (Alban Safari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah sangat berperan dalam proses pengembangan UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra.

b. Peminat

Minat beli konsumen adalah perilaku konsumen dimana seseorang mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, menggunakan dan mengonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Minat beli konsumen menjadi penentu jalannya serta berkembangnya suatu usaha. Jika konsumen memiliki minat yang tinggi untuk membeli suatu produk, maka dapat dipastikan bahwa produk tersebut akan terus berkembang, namun jika minat beli konsumen rendah, maka jalannya usaha akan sulit berkembang. Dalam usaha tempe Pabrik Tempe Soybean Zikra, minat beli konsumen terbilang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yaitu sebagai berikut:

“Untuk minat masyarakat terhadap tempe di sini lumayan tinggi. Hal itu dikarenakan tempe merupakan lauk pokok bagi masyarakat di sekitar sini” (Sit, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan akan pangan berjenis tempe sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu dibuktikan dari minat masyarakat untuk kebutuhan tersebut tinggi. Dengan minat masyarakat yang membutuhkan pangan

tersebut, maka UMKM tersebut terus kokoh untuk memproduksi tempe setiap harinya.

2. Faktor Penghambat

Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra, seperti kekurangan bahan baku, cuaca dan kekurangan karyawan. Seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Bahan Baku

Bahan baku adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan (Syamsuddin, 2011). Seluruh perusahaan yang memproduksi untuk menghasilkan satu atau beberapa macam produk tentu akan selalu memerlukan bahan baku untuk pelaksanaan proses produksinya. Bahan baku merupakan input penting dalam berbagai produksi. Kekurangan bahan baku yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses produksi karena habisnya bahan baku untuk diproses. Akan tetapi terlalu besarnya bahan baku dapat mengakibatkan tingginya persediaan dalam perusahaan yang dapat menimbulkan berbagai risiko maupun tingginya biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap persediaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra mengatakan bahwa:

“Kekurangan bahan baku, menjadi penghambat utama dalam proses pembuatan tempe. Karena untuk daerah Abdya sendiri, bukan penghasil kacang kedelai” (Alban Safari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan bahan baku merupakan faktor utama terhambatnya dalam proses produksi tempe. Bahan baku yang digunakan dalam produksi tempe adalah kacang kedelai. Menurut pemilik usaha UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra, di daerah setempat bukanlah penghasil kacang kedelai.

b. Cuaca

Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama yakni sama-sama menggambarkan kondisi udara (atmosfer bumi), namun keduanya juga memiliki perbedaan, terutama dari aspek fokus kajian, luasan wilayah dan kurun waktu pengkajian. Cuaca merupakan bentuk awal yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu tertentu (Kaho, 2014). Dalam penelitian ini, cuaca menjadi sebuah penghambat dalam pembuatan tempe di Pabrik Tempe Soybean Zikra.

Seperti yang diungkapkan salah satu karyawan Pabrik Tempe Soybean Zikra:

“Kami terhambat karena cuaca, kalau cuaca tidak bagus maka produksi tempe agak susah. Tempe yang sudah direbus akan cepat berjamur jika cuaca tidak bagus” (Alwi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa cuaca merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembuatan tempe di Pabrik Tempe Soybean Zikra. Faktor penghambat merupakan sesuatu yang sifatnya menghambat atau sebagai hal/keadaan atau penyebab lainnya yang menghambat (merintang, menahan dan menghalangi).

c. Karyawan

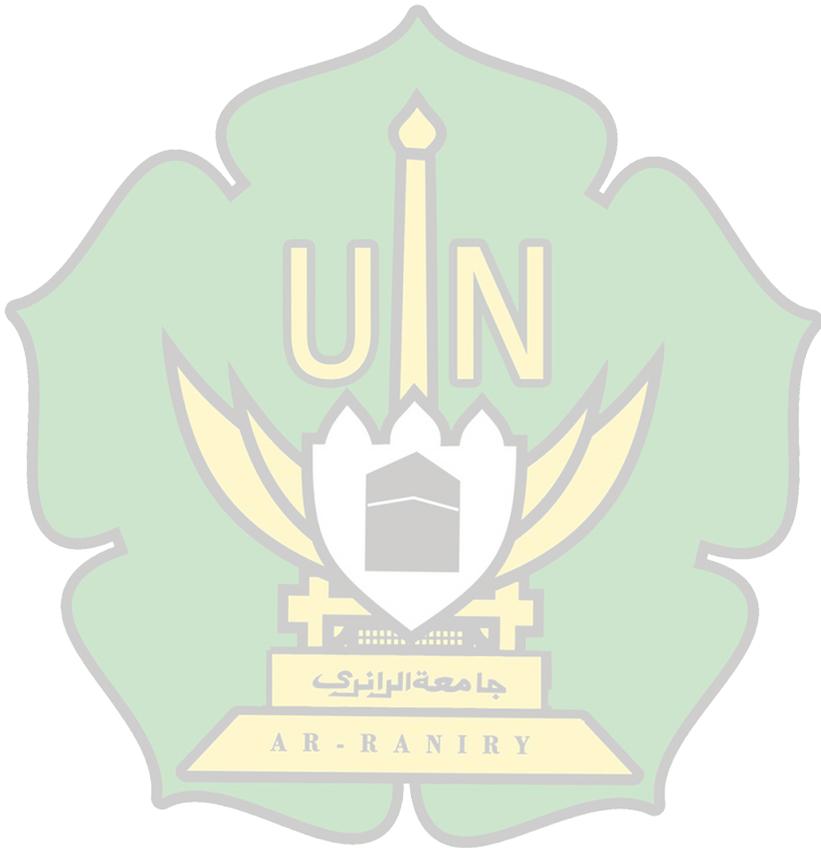
Karyawan merupakan aset perusahaan. Kehadiran karyawan begitu sangat penting hingga saat ini, tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi kelancaran dan proses produksi suatu perusahaan. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasa 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Karyawan juga didefinisikan sebagai tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Pada Pabrik Tempe Soybean Zikra, kekurangan karyawan menjadi suatu penghambat dalam proses pembuatan tempe. Hal itu diketahui dari hasil wawancara dengan pemilik UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra mengatakan bahwa:

“Di Pabrik bisa dibilang kita kekurangan karyawan. Karena kalau peminat tempunya banyak, otomatis kita harus produksi tempunya juga banyak. Jadi pas produksi tempe banyak, kita kualahan karena kurangnya karyawan”(Alban Safari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa jumlah karyawan mempengaruhi jalannya produksi tempe di Pabrik Tempe Soybean Zikra. Banyaknya peminat menjadi faktor utama bertambahnya jumlah tempe yang harus diproduksi, hal ini membuat tenaga kerja UMKM harus lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, karyawan yang

bekerja di UMKM Pabrik Tempe Soybean mengalami kekurangan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. UMKM di desa Alue Sungai Pinang mempunyai dampak positif terhadap masyarakat diantaranya yaitu membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang pendidikan, pendapatan, serta perumahan dan pemukiman.
2. Faktor-faktor yang mendukung UMKM UD. Mawar Sari dalam mensejahterakan masyarakat Desa Alue Sungai Pinang adalah dukungan pemerintah serta peminat dari tempe itu sendiri. Faktor pendukung UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra adalah dukungan pemerintah dan peminat dari konsumen.
3. Faktor-faktor yang menghambat UMKM UD. Mawar Sari dalam mensejahterakan masyarakat Desa Alue Sungai Pinang adalah modal, keterbatasan bahan baku serta jaringan usaha. Faktor penghambat UMKM Pabrik Tempe Soybean Zikra dalam mensejahterakan masyarakat Desa Alur Sungai Pinang adalah bahan baku, cuaca dan jumlah karyawan.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius lagi dalam upaya mendukung kemajuan

UMKM. Diharapkan dapat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan untuk UMKM UD. Mawar Sari dan Pabrik Tempe Soybean Zikra agar dapat bersaing dalam persaingan pasar.

2. Diharapkan kepada pelaku UMKM agar lebih inovatif serta dapat menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih guna mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2017). *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Anoraga, Pandji (2015). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT Dwi Candra Wacana.
- Anoraga, Pandji. (2015). *Manajemen Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar. (2017). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan)*. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Asriyah. (2017). Hitung Jumlah Bakteri Metode Pour Plate. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2 (2): 148.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen. Diakses pada website. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>. pada tanggal 8 November 2021.
- Bahtiar Rifai, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" *Jurnal Sosio Humaniora Vol. 3 No. 4 September 2012*. Diakses 12 Januari 2022.
- Bappenas. (2015). Rencana Jangka Menengah Nasional, Agenda Pembangunan Bidang (The National Development Plan 2015-2019 Sectoral Development Agenda). II, 1-1-10-81.
- Basar, Ade Muhammad Alimul. (2015). *Peranana Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan*

Masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Skripsi dipublikasikan. Kuningan.

Erwansyah. (2018). *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UKKM di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat)*. Skripsi dipublikasikan. Lampung: UIN Raden Lampung.

Fahrudin, Adi. (2017). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Faturocman. (2017). *Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hadinoto, Soetanto dan Djoko, Rednadi. (2017). *Mikro Credit Challenge. Cara efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta.

Halim, Abdul. (2015). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid I. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Iskandar. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ekonomi*.

Ismail, Humaidi. (2015). *Skripsi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil: Studi Terhadap Masyarakat di Sentra Industri Kecil di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur*.

Kaho, Josef Riwu. (2014). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Liony Wijayanti, Ihsannudin. (2018). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agriekonomika*.

- Machendrawaty, Nanih dan Safei, Agus Ahmad. (2016). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marlina, Tuti. (2017). *Analisis Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Kerajinan Kayu dalam Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi dipublikasikan.
- Medriyansyah. (2017). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Persepektif Ekonomi Islam*. Skripsi dipublikasikan.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, Ade. (2015). *Peranan Usaha kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*. Skripsi dipublikasikan. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Nasruddin, Multazam. (2016). *Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi di V. Citra Sari Kota Makassar)*. Skripsi dipublikasikan.
- Nopirin.(2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Notowidagdo, Rohiman. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah.
- Noveria, Mita. (2016). *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta: LIPI Pers.
- Nurmah Semil, Dr M.Si. (2018). *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis Pada Sistem Pelayanan Publik Di Indonesia*. Depok: Prenamedia Grup.
- Pratama, Dkk. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.

- Putra, Adnan Husada. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Analisis Sosiologi*.
- Rambe, Armaini, et all. (2019). Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. *Muh Chusnul Saifudin, At-Tujjar*, Vol. 07, No. 02 Oktober.
- Resalawati, Ade. (2016). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sanusi, Anwar. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Adi Ryan. (2019). *Analisis Sektor UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi D.I Yogyakarta*.
- Suci, Yuli Rahmini. (2017). Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Development*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Rr., A.Halim, dkk. (2015). *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: Akmal Publishing.
- Sukandarrumidi. (2017). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sukirno, Sadono. (2017). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukoco, Heru Dwi. (2017). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung : Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Sunarti E. (2017). *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.

Tambunan, Tulus T. H. (2019). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Taniman. (2017) Implementasi Csr (*Corporate Social Responsibility*) Di Koperasi Simpan Pinjam Maju Wijaya Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*/Volume 01/No.2/November-2017: 47-55.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2016). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid I)*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang nomor 20 tahun 2008.

Zahroh, Tsnaia Riza. (2017). *Peran UMKM Konveksi Hijab dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan*. Skripsi dipublikasikan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Seberapa besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Abdya khususnya di Alue Sungai Pinang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerlaku UMKM dalam menunjang perekonomian masyarakat Alue Sungai Piang?
3. Adakah peran pemerintah Aceh Barat Daya dalam membantu UMKM untuk menunjang ekonomi masyarakat khususnya di Alue Sungai Pinang?
4. Bentuk UMKM apakah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh Barat Daya khususnya Alue Sungai Pinang?
5. Seberapa besar ketergantungan masyarakat Alue Sungai Pinang terhadap UMKM?
6. Adakah keinginan pemerlaku UMKM untuk dibantu oleh pemerintah daerah demi pertubuhan ekonomi masyarakat Aceh Barat Daya?
7. Kebijakan seperti apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah Aceh Barat Daya terhadap UMKM demi mensejahterakan pelaku UMKM dan ekonomi masyarakat?
8. Pakah harapan saudara sebagai salah satu pelaku UMKM untuk masa depan ekonomi Aceh Barat Daya khususnya Alue Sungai Pinang?

Lampiran 2 Foto Dokumentasi





جامعة الرانيري
AR - RANIRY

